



Analisis Penerapan PSAP No. 13 Tentang Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Aditya Novriyan Rizki¹, Adzkie Rahmania Sausan², Ardha Aulia³, Bagas Nur Rachman⁴, Guntur Orni Aulia⁵

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Indonesia

Abstracts. *Higher education is a government entity that has the status of a Public Service Agency. To realize the achievement of improving the quality of education, higher education requires good management. One way is through the implementation of regulations in PSAP No. 13. This study discusses the compatibility between the regulations in PSAP No. 13 with the reality that occurred at Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta. The result is that Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta has implemented most of the regulations contained in PSAP No. 13.*

Keywords: *Government accounting, financial statements, BLU college, financial statement structure, disclosure, financial ratios, performance indicators.*

Abstrak. Perguruan tinggi merupakan entitas pemerintah yang memiliki status sebagai Badan Layanan Umum. Untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, maka perguruan tinggi memerlukan pengelolaan yang baik. Salah satu caranya adalah melalui pelaksanaan peraturan dalam PSAP No. 13. Penelitian ini membahas kesesuaian antara peraturan di PSAP No. 13 dengan realita yang terjadi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasilnya adalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sudah melaksanakan sebagian besar peraturan yang tercantum dalam PSAP No. 13.

Kata Kunci : Akuntansi pemerintahan, laporan keuangan, perguruan tinggi BLU, struktur laporan keuangan, pengungkapan, rasio keuangan, indikator kinerja.

1. Pendahuluan

Badan Layanan Umum adalah suatu organisasi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjual barang dan/atau jasa dengan tidak mengutamakan keuntungan dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip produktivitas dan efisiensi (Presiden RI, 2005). Dengan menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta menerapkan praktik bisnis yang kuat, Badan Layanan Umum berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) merupakan instansi pemerintah yang dapat ditetapkan sebagai BLU. Hal itu karena perguruan tinggi merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan penyediaan layanan jasa pendidikan. Perguruan Tinggi BLU diharapkan dapat berperan sebagai sebuah institusi yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan nasional dan memiliki daya saing yang tinggi dalam persaingan global. Untuk mendukung PTN BLU, pemerintah memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangannya. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) diatur melalui PP No. 23 Tahun 2005 dan diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 mengatur mengenai persyaratan, penetapan, dan pencabutan status BLU, standar dan tarif layanan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menjadi dasar sebagai pembentukan PSAP No.13 mengenai penyajian laporan keuangan BLU. Dengan penerapan PPK-BLU tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini juga berdampak terhadap standar akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangannya diwajibkan oleh pemerintah yaitu menggunakan PSAP No. 13.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penggunaan metode deskriptif kualitatif adalah dengan menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, peneliti dapat mengungkapkan peristiwa atau fakta, fenomena, variabel, dan keadaan yang ada saat ini; dan menafsirkan serta menguraikan data dengan melihat situasi saat ini.

2.2 Fokus Penelitian

Besarnya kepentingan, urgensi, dan kelayakan masalah yang mungkin timbul selama pelatihan, serta faktor keterbatasan tenaga, sumber daya, dan waktu, menjadi fokus penelitian kualitatif. Keterbatasan PSAP 13 terkait Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di BLU Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah menjadi fokus pelaksanaan studi ini.

2.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapat dengan melakukan observasi langsung terhadap proses akuntansi dan pelaporan keuangan di perguruan tinggi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Laporan Keuangan

Menurut (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2009) dalam PSAP No. 13, laporan keuangan Badan Layanan Umum terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sedangkan laporan keuangan tahun 2021 milik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (*Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Laporan Keuangan Tahun 2021, 2020*) terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. CALK.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini telah menjadi salah satu perguruan tinggi dengan Status BLU. Laporan Keuangan tahun 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga.

Dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BLU, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 13 tentang penyajian Laporan Keuangan BLU.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang merupakan entitas pelaporan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan PSAP No. 13.

4. Kesimpulan

4.1 Perguruan tinggi dapat ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) namun harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang terkait BLU. UIN Syarif Hidayatullah sudah ditetapkan sebagai BLU sehingga penyusunan laporan keuangannya mengacu pada PSAP No. 13. Dalam laporan keuangannya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah sesuai dengan PSAP No. 13. Laporan keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyajikan 7 laporan keuangan yang sesuai dengan PSAP No. 13. Perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai BLU juga harus menerapkan

PPK-BLU yang mana memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya sehingga bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Daftar Pusaka

Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2009). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217 Tahun 2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. *Standart Akuntansi Pemerintahan No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU*.

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Laporan Keuangan Tahun 2021. (2020). 95.

Presiden RI. (2005). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*.